

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DALAM RANGKA
MENINGKATKAN DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

(Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara)

Zulfiandri Kurniawan,

Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Universitas
Brawijaya, Malang
Email: zulfiandrikurniawan@yahoo.co.id

Abdul Juli Andi Gani,

Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Universitas
Brawijaya, Malang

Mochamad Makmur

Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Universitas
Brawijaya, Malang

ABSTRACT

This study aims to analyze tourism development planning in order to increase tourist attraction in Kutai Kartanegara district, there are natural, cultural and artificial tourist attractions in Kutai Kartanegara district which are still largely undeveloped. The results showed that tourism development planning in Kutai Kartanegara district carried out by the District Tourism Office of Kutai Kartanegara began with the determination of the objectives and targets set out in the Strategic Plan, then data collection and analysis were carried out in the form of internal and external data. preparation of plans that are finally realized in programs and activities, the planning stages that are carried out are in accordance with tourism development planning through several approaches. Stakeholders involved in tourism development planning, namely the government, the private sector and the community. There are inhibiting factors in tourism development planning in Kutai Kartanegara District, namely human resource planning factors, system factors used and funding factors in tourism planning.

Keywords: *tourism development planning, tourist attraction*

PENDAHULUAN

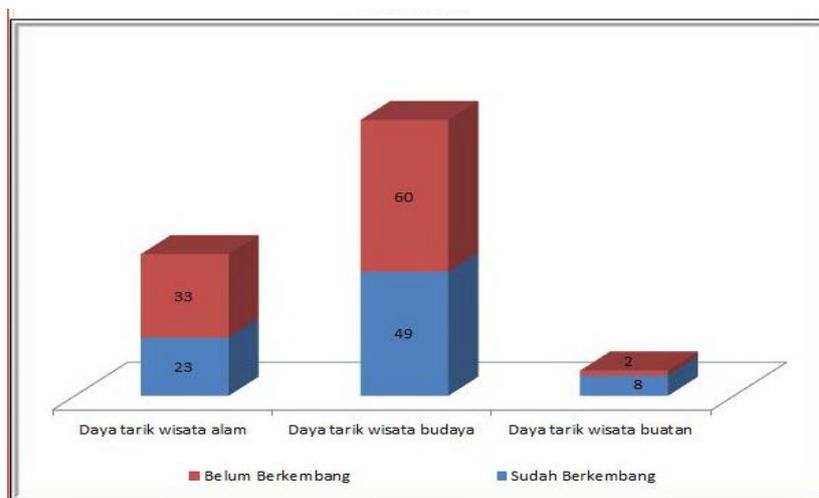
Pariwisata di akui telah berperan penting dalam pembangunan karena memberikan dampak terhadap perekonomian suatu negara atau daerah yang menjadi objek wisata. Pariwisata dan kegiatan pendukungnya merupakan salah satu sektor yang memiliki peran dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah dan akhirnya memberi kontribusi bagi pendapatan suatu daerah dan masyarakat. Ada beberapa karakteristik unggul dari sektor pariwisata atau industri keparawisataan yang menyebabkan industri ini mampu berperan sebagai lokomotif bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah, diantaranya adalah: (1) Sektor keparawisataan adalah sebuah industri yang mempunyai keterkaitan rantai nilai (*multiplier effect*) yang sangat panjang dan mampu menjalin sinergi pertumbuhan dengan berbagai usaha mikro termasuk kegiatan *home industry*. (2) Usaha keparawisataan mampu menyerap banyak sumber daya setempat (*local resources based*) dan utamanya berbahan baku yang relative tidak pernah habis atau terbeharui (*renewable resources*). (3) industri keparawisataan tidak ada *over supply* karena mempunyai karakteristik produk yang khas, dan relative tidak terpengaruh oleh situasi resesi atau krisis ekonomi pada suatu negara. (Sunaryo 2013:35). Di samping manfaat ekonomi secara nasional, dari perspektif peningkatan

kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, keparawisataan juga sangat berpotensi untuk menjadi instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja pada aspek kesejahteraan material dan spiritual saja, akan tetapi juga mampu meningkatkan aspek kesejahteraan kultural dan intelektual dari masyarakat sebagai tuan rumah (*host*) di suatu destinasi wisata.

Kabupaten Kutai Kartanegara memang lebih dikenal sebagai daerah dengan sumber daya alamnya yang berlimpah terutama di sektor migas dan pertambangan batu bara yang dimana sektor ini merupakan ladang utama atau yang berkontribusi besar kepada penerimaan daerah setiap tahunnya hingga kini, penerimaan daerah tersebut diperoleh dari bagian dana perimbangan, dimana dana bagi hasil bukan pajak memberikan share terbesar dari total dana perimbangan, Keadaan yang demikian menggambarkan bahwa sumber keuangan daerah Kutai Kartanegara masih sangat tergantung pada dana perimbangan, dan untuk jangka panjang kondisi yang demikian sangat rawan terhadap kontinuitas pembangunan di kabupaten Kutai Kartanegara. Hal itu tercermin dari nilai distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku yang masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, Sektor pertambangan memiliki kontribusi sebesar 76,30 persen terhadap perekonomian di Kutai Kartanegara. Jika sektor migas dikeluarkan, sektor pertambangan juga masih mendominasi perannya yakni sebesar 59,39 persen (LKPJ TA 2016 Kabupaten Kutai Kartanegara).

Kabupaten Kutai Kartanegara selain terkenal dengan daerah yang kaya dengan sumber daya alam, juga memiliki beragam daya tarik wisata yang unik dan menarik baik itu daya tarik wisata alam, budaya, maupun buatan. Jenis daya tarik wisata yang paling banyak dimiliki Kutai Kartanegara adalah daya tarik wisata budaya. Namun sampai saat ini potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara belum di manfaatkan secara maksimal, hal ini dapat di lihat dari kunjungan wisatawan ke objek-objek wisata yang, tingkat kunjungan wisatawan di kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu sejumlah 1.731.031 di bandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 sejumlah 1.914.220. penurunan kunjungan wisatawan yang terjadi disebabkan oleh kurangnya pengembangan pada daya tarik atau destinasi wisata yang sudah ada, berdasarkan observasi peneliti objek-objek pariwisata yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara minim dalam pengembangan atau pembangunan sarana dan prasarananya maupun pembaharuan fasilitas yang bisa menarik wisatawan.

Gambar 1 Kondisi Perkembangan Daya Tarik Wisata Berdasarkan Jenis Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017



Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

dari data di atas dapat dilihat bahwa masih banyak daya tarik wisata yang belum berkembang di kabupaten Kutai Kartanegara paling banyak pada daya tarik wisata budaya yaitu 60 daya tarik wisata budaya. Dalam hal ini proses perencanaan pembangunan pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi sorotan, karena Perencanaan berperan sangat penting dan menentukan kelancaran dan keberhasilan pembangunan pariwisata. dalam kaitan ini, perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang optimal merupakan kunci untuk mewujudkan tujuan pembangunan termasuk pembangunan keparawisataan. Proses perencanaan pembangunan pariwisata menjadi sangat penting sebagaimana menurut Inskeep (dalam sunaryo 2013:132) perencanaan pembangunan pariwisata merupakan suatu proses untuk mempersiapkan secara sistematis dan rasional segenap kegiatan atau aktivitas keparawisataan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan tersebut secara optimal dengan mengalokasikan keseluruhan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Berdasarkan pengamatan penulis apa yang telah dilaksanakan Dinas Parawisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pembangunan pariwisata lebih mengarah pada program pemasaran pariwisata dibandingkan mengembangkan daya tarik wisata atau destinasi wisata yang sudah ada padahal destinasi yang sudah ada seharusnya dikembangkan dahulu baru kemudian di laksanakan pemasaran pariwisata agar wisatawan datang berkunjung. Sebagaimana Menurut Kaiser dan Helber (dalam Yoeti 1997:29) tingkat-tingkat perencanaan pariwisata itu dimulai dari pengembangan pariwisata daerah (*Regional Tourism Development*), mencakup pembangunan fisik obyek dan atraksi wisata yang akan dijual, fasilitasi akomodasi, restoran, pelayanan umum (telepon, *money changer*, dan lain-lain), angkutan wisata dan perencanaan promosi yang akan dilakukan. Sama halnya Menurut Carter dan fabricius (dalam Sunaryo 2013:172) terdapat beberapa elemen dasar yang harus diperhatikan perencana (*planner*) dalam perencanaan pengembangan sebuah destinasi pariwisata, paling tidak akan mencakup aspek-aspek sebagai berikut: 1) Pengembangan Atraksi dan daya tarik wisata; 2) Pengembangan amenities (fasilitas dasar) dan akomodasi wisata; 3) Pengembangan aksesibilitas; 4) Pengembangan *Image*.

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah pertama, Bagaimanakah perencanaan pembangunan pariwisata dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kedua, Bagaimanakah keterlibatan stakeholders dalam perencanaan pembangunan pariwisata dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ketiga, Apakah faktor penghambat perencanaan pembangunan pariwisata dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dapat di gunakan Bagi masyarakat sebagai pengetahuan mengenai pentingnya peranan Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan Perencanaan Pembangunan pariwisata dan selain itu Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan gambaran bagi kalangan pemerintah dan pelaku (*stakeholder*) yang terlibat dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan Parawisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.

METODE

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Situs penelitian di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Pembangunan Pariwisata dalam Rangka Meningkatkan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - a. Tahapan perencanaan
 - b. Pendekatan perencanaan

- 2) Keterlibatan stakeholders dalam Perencanaan Pembangunan Pariwisata dalam Rangka Meningkatkan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara
 - a. Identifikasi Stakeholder
 - b. Peran Stakeholder
- 3) Faktor Penghambat dalam Perencanaan Pembangunan Pariwisata dalam Rangka Meningkatkan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - a. Faktor sumber daya manusia perencana
 - b. Faktor sistem yang digunakan
 - c. Faktor pendanaan

Sumber dan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu Penulis sendiri, Pedoman wawancara (*interview guide*), Catatan lapangan (*field note*), Alat perekam, dan Alat tulis menulis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikemukakan Miles dan Huberman yang dibagi penelitian menjadi dua kegiatan yaitu pengumpulan data dan analisis data. Miles, Huberman dan Saldana (2013:12) menjelaskan ketiga alur kegiatan analisis data yaitu 1) Kondensasi data, diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan.; 2) Peyajian data, pada tahap ini informasi yang telah dikumpulkan dan direduksi sesuai dengan fokus yang telah dikelompokkan, disusun dan disajikan dalam bentuk grafik atau bagan dengan tujuan untuk memudahkan peneliti menganalisis dan menarik kesimpulan terhadap sebuah peristiwa yang sedang terjadi; 3) Penarikan kesimpulan yaitu, melakukan verifikasi secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data.

TEORI

Terdapat dua jenis perencanaan menurut Faludi (1973:3) yaitu perencanaan prosedural (*procedural planning*) dan perencanaan substantif (*substantive planning*). Teori prosedural berhubungan erat dengan teori yang membahas tentang cara atau teknik perencanaan sehingga kualitas rencana yang dihasilkan sesuai dengan yang dikehendaki, Sedangkan teori substantif lebih merujuk pada bidang perhatian atau substansi bidang yang sedang di rencanakan. Selanjutnya menurut Muluk (2007:13) bahwa teori substantif (*theory in planning*) lebih merujuk pada bidang perhatian atau substansi bidang yang di rencanakan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan perencanaan berhasil atau gagal. Secara umum Riyadi dan Dedy (2004:15) menyatakan factor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu program perencanaan antara lain, meliputi: 1) Faktor lingkungan; 2) Factor Sumber Daya Manusia Perencana; 3) Faktor Sistem yang Digunakan; 4) Factor Perkembangan Ilmu dan Teknologi; 5) Faktor Pendanaan. Riyadi dan Bratakusumah (2004:41) Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan gambaran (deskripsi) tentang sasaran akhir yang ingin diwujudkan melalui kegiatan pembangunan. sedangkan sasaran pembangunan adalah jabaran lebih konkret tentang tujuan pembangunan tersebut. Sasaran pembangunan biasanya dirumuskan dalam bentuk target pembangunan secara makro yang harus di capai pada akhir periode pembangunan. Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan ini perlu di lakukan secara hati-hati agar pencapaiannya menjadi lebih terjamin sesuai dengan yang telah ditetapkan semula. Crosby (dalam iqbal 2007:90) bahwa dalam pemangku kepentingan dapat dibedakan atas tiga kelompok, yaitu: 1) Pemangku kepentingan utama, yakni yang menerima dampak positif atau negatif dari suatu kegiatan; 2) Pemangku kepentingan penunjang, adalah yang menjadi perantara dalam membantu proses penyampaian kegiatan. Mereka dapat digolongkan atas pihak penyandang dana, pelaksana, pengawas, dan organisasi advokasi seperti organisai pemerintah, LSM, dan pihak swasta; dan 3) Pemangku kepentingan kunci,

yakni yang berpengaruh kuat atau penting terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan.

Pitana dan Diarta (2009:109). Sebuah organisasi pariwisata mempunyai sistem informasi data internal, tetapi organisasi juga memerlukan informasi eksternal yang cukup sebagai dasar pengambilan keputusan. Yoeti (1997:53) pengembangan objek dan atraksi wisata melalui a) pengembangan produk baru, yaitu usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana untuk memperbaiki produk yang sedang berjalan atau menambah jenis produk yang dihasilkan ataupun yang akan dipasarkan. Umumnya suatu produk baru yang dihasilkan hendaklah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan; b) pengembangan atraksi wisata, yaitu atraksi wisata adalah sesuatu yang dapat dilihat atau disaksikan melalui suatu pertunjukan (*shows*) yang khusus diselenggarakan untuk para wisatawan. Tahapan perencanaan dalam pariwisata menurut Pitana dan diarta (2009: 109) yaitu sebagai berikut: 1) menentukan bisnis/usaha apa yang akan di masuki yang biasanya dicirikan oleh misi instansi yang tergantung pada jenis usaha yang di masuki; 2) menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai; 3) mengumpulkan informasi dan pengetahuan; 4) menganalisa informasi; 5) menentukan tujuan khusus yang menentukan aktivitas yang diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi secara keseluruhan; 6) menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditentukan; 7) mendistribusikan sumberdaya ke masing-masing program aksi untuk memberikan dampak pada strategi yang diambil; 8) mengimplementasikan rencana; dan 9) mengontrol dan memonitor hasil dan membuat perbaikan jika diperlukan. Sunaryo (2013:87) dengan menyadari bahwa pariwisata adalah kegiatan yang tidak mengenal batas, baik dalam artian sektor kegiatan, ruang (spasial) dan wilayah (regional), maka pengembangan kepariwisataan sangat memerlukan pendukungan dan sinergi program pengembangan kepariwisataan secara lintas sektor dan lintas daerah.

PEMBAHASAN

Perencanaan Pembangunan Pariwisata dalam Rangka Meningkatkan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam melakukan perencanaan peningkatan daya tarik wisata langkah awal yang dilakukan adalah dengan menetapkan tujuan pembangunan khususnya pembangunan pariwisata, perencanaan pembangunan pariwisata dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata termasuk pada teori substantif (*theory in planning*) hal ini sesuai dengan pernyataan Muluk (2007:13) bahwa teori substantif (*theory in planning*) lebih merujuk pada bidang perhatian atau substansi bidang yang di rencanakan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, suatu daerah akan menggunakan sumberdaya-sumberdayanya secara tidak efektif. Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan capaian akhir yang diharapkan dari suatu kegiatan atau program, tujuan biasanya dinyatakan dalam satu rumusan. Sebagaimana dikemukakan oleh Riyadi dan Bratakusumah (2004:41) Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan gambaran (deskripsi) tentang sasaran akhir yang ingin diwujudkan melalui kegiatan pembangunan. sedangkan sasaran pembangunan adalah jabaran lebih konkret tentang tujuan pembangunan tersebut. Sasaran pembangunan biasanya dirumuskan dalam bentuk target pembangunan secara makro yang harus di capai pada akhir periode pembangunan. tujuan yang sudah di tetapkan di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dengan peningkatan daya tarik wisata adalah “Mewujudkan Kutai Kartanegara Sebagai Branding Pariwisata Unggulan Di Kalimantan Timur” dan sasaran yaitu “Meningkatnya pengembangan seni dan budaya lokal dalam rangka mendukung destinasi wisata” dan “kelestarian tradisi masyarakat dan sasaran ke empat yaitu Meningkatkan potensi dan daya dukung pariwisata daerah serta kunjungan wisata di Kutai Kartanegara”.

Mengumpulkan data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan merupakan tahapan selanjutnya dalam sebuah perencanaan pembangunan pariwisata dalam rangka meningkatkan

daya tarik wisata, Data yang di gunakan dalam perencanaan pembangunan pariwisata dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata ada 2 (dua) yaitu data sekunder dan data primer, Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Pitana dan Diarta (2009:109). Sebuah organisasi pariwisata mempunyai sistem informasi data internal, tetapi organisasi juga memerlukan informasi eksternal yang cukup sebagai dasar pengambilan keputusan.

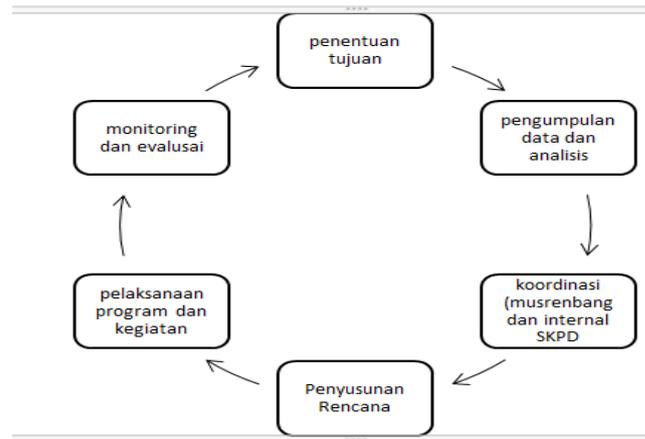
Tahapan selanjutnya dalam mewujudkan peningkatkan daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah penyusunan rencana secara bertahap yang pada akhirnya di wujudkan dalam program-program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan daya tarik wisata. Dalam penyusunan rencana di dinas pariwisata di koordinir oleh bagian penyusunan program, data yang berkaitan dengan peningkatan daya tarik wisata di kumpulkan dari setiap seksi-seksi yang ada, data tersebut berasal dari hasil evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya, data juga diperoleh dari aspirasi-aspirasi yang terhimpun saat pelaksanaan musrenbang, permasalahan dan perkembangan-perkembangan yang terjadi di lapangan dan usulan-usulan kegiatan tahun berikutnya dengan tetap mengacu pada kebijakan yang ada.

Melalui koordinasi terpadu yang dijalin antar sektor tersebut, maka dapat disiapkan kerangka pengembangan terpadu yang akan memberikan nilai manfaat yang besar dalam jangka panjang, baik dalam hal penerimaan devisa, penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan produk lokal, pemberdayaan ekonomi rakyat, maupun konservasi lingkungan dan sumber daya alam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryo (2013:87) dengan menyadari bahwa pariwisata adalah kegiatan yang tidak mengenal batas, baik dalam artian sektor kegiatan, ruang (spasial) dan wilayah (regional), maka pengembangan kepariwisataan sangat memerlukan pendukung dan sinergi program pengembangan kepariwisataan secara lintas sektor dan lintas daerah.

Dinas pariwisata dalam melakukan peningkatan daya tarik wisata di kabupaten Kutai kartanegara sangat mengandalkan Event-event pariwisata, hal ini terbukti di dalam Kalender event kabupaten Kutai kartanegara menunjukkan setiap bulan selalu ada event pariwisata yang di laksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan di selenggarakan di beberapa tempat berbeda, tidak hanya berpusat di kota tenggarong sebagai ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara namun juga di beberapa kecamatan-kecamatan yang lain. Event yang di selenggarakan tersebut merupakan bentuk pengembangan objek dan atraksi wisata yang di lakukan oleh Dinas pariwisata kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana yang di kemukakan oleh Yoeti (1997:53) pengembangan objek dan atraksi wisata melalui a) pengembangan produk baru, yaitu usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana untuk memperbaiki produk yang sedang berjalan atau menambah jenis produk yang dihasilkan ataupun yang akan dipasarkan. Umumnya suatu produk baru yang dihasilkan hendaklah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan; b) pengembangan atraksi wisata, yaitu atraksi wisata adalah sesuatu yang dapat dilihat atau disaksikan melalui suatu pertunjukan (*shows*) yang khusus diselenggarakan untuk para wisatawan.

Tahapan perencanaan pembangunan pariwisata yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata di kabupaten Kutai Kartanegara dapat di gambarkan sebagai berikut:

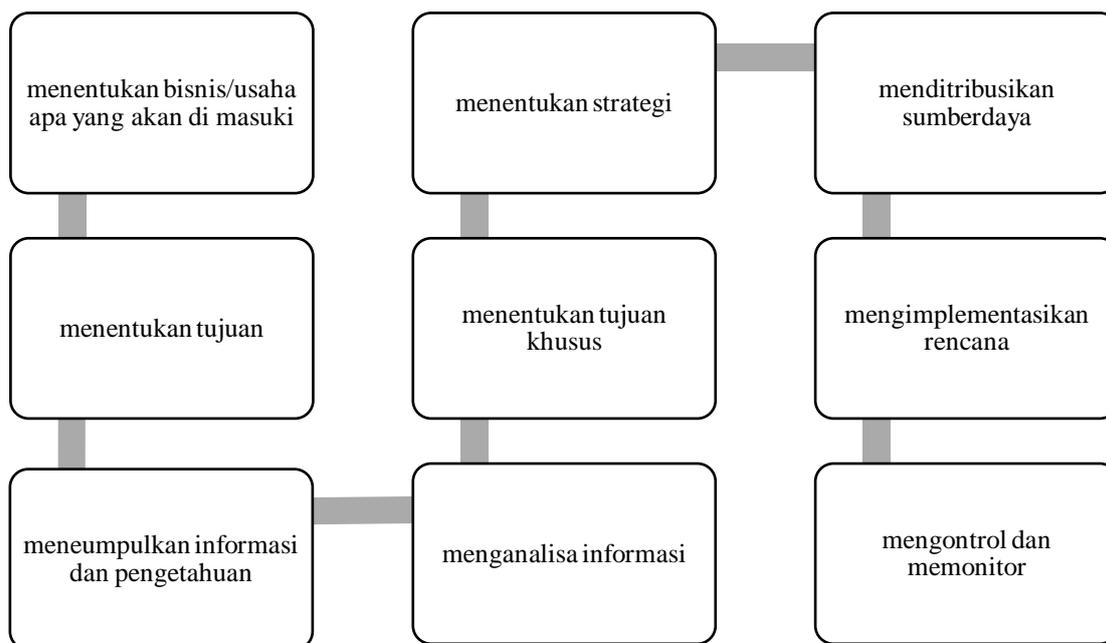
Gambar 2 tahapan perencanaan pembangunan pariwisata dalam rangka peningkatan daya tarik wisata di kabupaten kutai kartamegara



Sumber: Diolah Peneliti

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa tahapan perencanaan pembangunan pariwisata dalam rangka peningkatan daya tarik wisata di kabupaten kutai kartamegara diawali dengan : 1) penentuan tujuan perencanaan pembangunan pariwisata yang disesuaikan dengan Renstra Dinas Pariwisata dan RPJMD Daerah kabupaten kutai kartamegara; 2) pengumpulan data dan analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti data potensial dan data aktual terkait peningkatan daya tarik wisata yaitu dari seksi-seksi yang ada di dinas pariwisata dan aspirasi para *stakeholders*; 3) Koordinasi disini dilakukan sebagai upaya identifikasi pemecahan masalah dalam proses perencanaan untuk menentukan program dan kegiatan prioritas diantara alternatif pilihan yang diperoleh dari usulan masyarakat dan pelaksanaannya melalui forum musrenbang dan koordinasi internal yang dilakukan dinas pariwisata kabupaten kutai kartamegara; 4) penyusunan Rencana program dan kegiatan. Dalam tahap ini disusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan acuan atas dasar perencanaan pembangunan pariwisata dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata yaitu Renstra Dinas dan RPJMD daerah Kabupaten Kutai kartamegara; 5) Pelaksanaan Program dan kegiatan; 6) Monitoring dan evaluasi.

Adapun tahapan perencanaan dalam pariwisata menurut Pitana dan diarta (2009: 109) dapat dilihat di gambar berikut



Gambar 3 tahapan perencanaan dalam pariwisata menurut Pitana dan diarta
Sumber: Pitana dan diarta (2009: 109)

Dari gambar di atas dapat dijelaskan umumnya perencanaan dalam pariwisata terdiri dari beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut: 1) menentukan bisnis/usaha apa yang akan di masuki yang biasanya dicirikan oleh misi instansi yang tergantung pada jenis usaha yang di masuki; 2) menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai; 3) meneumpulkan informasi dan pengetahuan; 4) menganalisa informasi; 5) menentukan tujuan khusus yang menentukan aktivitas yang diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi secara keseluruhan; 6) menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditentukan; 7) mendistribusikan sumberdaya ke masing-masing program aksi untuk memberikan dampak pada strategi yang diambil; 8) mengimplementasikan rencana; dan 9) mengontrol dan memonitor hasil dan membuat perbaikan jika diperlukan. Dari penjelasan tersebut dan hasil kajian dari peneliti dapat di simpulkan bahwa secara umum perencanaan pembangunan pariwisata dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata di kabupaten kutai kartanegara sesuai dengan tahapan perencanaan pariwisata yang di sampaikan oleh Pitana dan diarta sehingga bisa dikatakan bahwa perencanaan pembangunan pariwisata dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata di kabupaten kutai kartanegara mendukung model perencanaan Pitana dan diarta. Ada 5 (lima) pendekatan dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata yang dilaksanakan Dinas Pariwisata yaitu 1) proses politik. 2) proses teknokratik. 3) proses partisipatif. 4) proses bottom-up dan 5) proses top-down.

Keterlibatan *stakeholders* dalam Perencanaan Pembangunan Pariwisata dalam Rangka Meningkatkan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara

Hasil identifikasi diketahui *stakeholders* atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Stakeholders* yang terlibat yaitu pihak pemerintah, swasta dan masyarakat hal ini sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10. Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, paling tidak terdapat 3 (tiga) komponen pemangku kepentingan pengembangan kepariwisataan di Indonesia, yaitu

- 1) Pertama, pihak pemerintah dan atau pemerintah daerah
- 2) Kedua, pihak swasta/industri baik yang merupakan investor asing dan ataupun pelaku industri dalam negeri,

- 3) Ketiga, pihak masyarakat yang terkait, baik sebagai tenaga kerja, pelaku kegiatan usaha kepariwisataan maupun sebagai tuan rumah (*host*)

Stakeholders yang terlibat dalam perencanaan pembangunan pariwisata di kabupaten kutai kartanegara adalah pihak pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, ketiga pihak ini ada yang merupakan stakeholders utama, stakeholder penunjang dan stakeholders kunci seperti yang dikemukakan oleh Crosby (dalam iqbal 2007:90) bahwa dalam pemangku kepentingan dapat dibedakan atas tiga kelompok, yaitu: 1) Pemangku kepentingan utama, yakni yang menerima dampak positif atau negatif dari suatu kegiatan; 2) Pemangku kepentingan penunjang, adalah yang menjadi perantara dalam membantu proses penyampaian kegiatan. Mereka dapat digolongkan atas pihak penyandang dana, pelaksana, pengawas, dan organisasi advokasi seperti organisasi pemerintah, LSM, dan pihak swasta; dan 3) Pemangku kepentingan kunci, yakni yang berpengaruh kuat atau penting terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan.

Stakeholders utama adalah mereka yang menerima dampak suatu perencanaan, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dalam hal ini yang menjadi stakeholders utama adalah masyarakat yang di wakili oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang ada di seluruh kabupaten kutai kartanegara dan pihak kesultanan Kutai Kartanegara yang di harapkan menerima dampak positif dari adanya peningkatan daya tarik wisata yang di rencanakan. Pada *stakeholders* penunjang merupakan mereka yang tidak secara langsung terlibat dalam perencanaan namun memiliki perhatian yang besar dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Keberadaan mereka mampu mendorong keberhasilan maupun kegagalan suatu perencanaan. Dalam hal ini yang menjadi stakeholders penunjang adalah pihak swasta yang diwakili oleh pelaku usaha pariwisata yang ada di kabupaten kutai kartanegara, perusahaan Total E&P Indonesia, PT. Anugrah Bara Kaltim dan Bank Kaltim serta SKPD lainnya yang terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi (Disperindagkop) dan yang terakhir media massa. *Stakeholders* Kunci Merupakan yang berpengaruh kuat atau penting terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan. Dalam hal ini Dinas Pariwisata kabupaten kutai kartanegara sebagai unsur perangkat daerah yaitu memiliki tugas salah satunya dalam mengurus bidang pariwisata menjadi stakeholders kunci dalam perencanaan pembangunan pariwisata dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata di kabupaten Kutai Kartanegara. Dari pembahasan di atas maka dapat di ketahui bahwa stakeholders yang sangat berperan dalam perencanaan pembangunan pariwisata dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata di kabupaten kutai kartanegara adalah pihak pemerintah daerah, pihak pemerintah daerah yang telah di uraikan di atas adalah Dinas Pariwisata kabupaten Kutai kartanegara yang juga merupakan stakeholders kunci dalam perencanaan. Perencanaan pembangunan pariwisata dalam prosesnya di dominasi perah pemerintah daerah dan masyarakat sedangkan peran swasta masih kurang. Dapat pula di jelaskan peran pemangku kepentingan pariwisata di Di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut: Pemerintah sebagai fasilitator dan regulator; Swasta sebagai Investor/pengembang; dan Masyarakat sebagai Tuan Rumah, Pelaksana/Subjek Pengembangan.

Faktor Penghambat dalam Perencanaan Pembangunan Pariwisata dalam Rangka Meningkatkan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam Perencanaan Pembangunan Pariwisata dalam Rangka Meningkatkan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara sumberdaya manusia perencana menjadi kendala dalam melakukan perencanaan dari hasil penelitian di ketahui bahwa dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata di Dinas pariwisata kabupaten kutai kartanegara murni hanya di lakukan oleh dinas pariwisata secara mandiri yang dikoordinasi oleh bagian penyusunan program, dalam pelaksanaan perencanaan tersebut tidak ada di bantu oleh tenaga

ahli atau akademisi yang lebih berkompeten dalam hal perencanaan, hal ini ternyata di sebabkan oleh minimnya anggaran yang di dapat oleh dinas pariwisata sehingga dalam rangka efisiensi anggaran maka dinas pariwisata tidak ada menjalin kerjasama dengan pihak ketiga tersebut dalam melakukan perencanaan.

Kabupaten Kutai Kartanegara sebenarnya sudah menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) namun masih terkendala belum dapat pengesahan dari DPRD padahal Pengesahan RIPPARKAB oleh DPRD di perlukan yaitu sebagai payung hukum untuk dapat mengayomi kepentingan semua *stakeholders* dalam penyelenggaraan kepariwisataan dan Ripparkab juga dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Mengutip pendapat dari Riyadi dan Bratakusumah (2004:30) bahwa sistem perencanaan adalah aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh suatu daerah/wilayah tertentu sebagai dasar /landasan pelaksanaan perencanaan pembangunannya. Maka dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut Ripparkab sangat di butuhkan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kepariwisataan di kabupaten kutai kartanegara, karena Ripparkab adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun.

Perencanaan pembangunan pariwisata dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata di kabupaten kutai kartanegara juga mengalami kendala di dalam hal pendanaan, kendala ini merupakan masalah klasik yang di hadapi oleh Dinas pariwisata kabupaten kutai kartanegara, karena perencanaan di sektor pariwisata membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit dan perencanaan pariwisata itu multisektor, dan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai daya tarik wisata baik Alam, Budaya maupun Daya tarik wisata buatan. sehingga dalam program dan kegiatan yang di rencanakan oleh Dinas pariwisata tidak banyak kegiatan yang isinya melakukan pengembangan destinasi wisata yang sudah ada dalam rangka meningkatkan daya tarik wisatanya tetapi kegiatan yang di lakukan banyak hanya bersifat fasilitasi event dan bahkan karena terbatasnya anggaran pihak dinas pariwisata melakukan kerja sama dengan pihak swasta yang ada seperti perusahaan Total E&P Indonesia, PT. Anugrah Bara Kaltim dan Bank Kaltim untuk menjadi sponsor event budaya yang diselenggarakan

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perencanaan pembangunan pariwisata dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara di lakukan melalui tahapan-tahapan perencanaan yang diawali dengan penentuan tujuan yang berkaitan dengan pembangunan pariwisata di kabupaten kutai kartanegara khususnya dalam peningkatan daya tarik wisatanya, tujuan tersebut sudah tertuang di dalam Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai kartanegara tahun 2016-2021 dan juga berpedoman dengan RPJMD daerah. Tahapan selanjutnya yaitu pengumpulan dan analisa data dalam melakukan perencanaan dimana data yang di kumpulkan berasal dari evaluasi dari setiap seksi di dinas pariwisata pada program yang telah di jalankan tahun sebelumnya dan juga berasal dari hasil penjarangan aspirasi masyarakat saat pelaksanaan musrenbang. Tahapan selanjutnya adalah penyusunan rencana yang pada akhirnya diwujudkan dalam program-program dan kegiatan, diketahui kegiatan yang di laksanakan oleh dinas pariwisata pada tahun 2017 lebih fokus kepada fasilitasi event budaya dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata di kabupaten kutai kartanegara, sedangkan pengembangan destinasi wisata masih minim di rencanakan karena kebutuhan biaya yang besar. Ada 5 (lima) pendekatan di lakukan oleh dinas pariwisata kabupaten kutai kartanegara dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata untuk meningkatkan daya tarik wisata yang dilaksanakan Dinas Pariwisata

- yaitu 1) proses politik. 2) proses teknokratik. 3) proses partisipatif. 4) proses bottom-up dan 5) proses top-down.
2. *Stakeholders* yang terlibat dalam Perencanaan Pembangunan Pariwisata dalam Rangka Meningkatkan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pihak pemerintah, swasta dan masyarakat, ketiga stakeholders tersebut di kelompokkan berdasarkan *stakeholders* utama adalah masyarakat yang di wakili oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang ada di seluruh kabupaten kutai kartanegara dan pihak kesultanan Kutai Kartanegara. *stakeholders* penunjang adalah pihak swasta yang di wakili oleh pelaku usaha pariwisata yang ada di kabupaten kutai kartanegara, perusahaan Total E&P Indonesia, PT. Anugrah Bara Kaltim dan Bank Kaltim serta SKPD lainnya yang terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi (Disperindagkop) dan yang terakhir media massa. Dinas Pariwisata kabupaten kutai kartanegara sebagai unsur perangkat daerah yaitu memiliki tugas salah satunya dalam mengurus bidang pariwisata menjadi *stakeholders* kunci dalam perencanaan pembangunan pariwisata dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata di kabupaten Kutai Kartanegara. Secara umum *Stakeholders* yang terlibat yaitu pihak pemerintah, swasta dan masyarakat masing-masing berperan dalam Perencanaan Pembangunan Pariwisata dalam Rangka Meningkatkan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator, Masyarakat berperan sebagai Tuan Rumah, Pelaksana/Subjek Pengembangan, dan Swasta berperan sebagai Investor/pengembang. Peran pemerintah masih sangat dominan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pariwisata di kabupaten Kutai Kartanegara bila dibandingkan dengan pihak swasta dan masyarakat
 3. Faktor penghambat dalam perencanaan pembangunan Pariwisata dalam Rangka Meningkatkan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu: (1) Faktor sumber daya manusia perencana yang sedikit dan kurang berkompeten, (2) Faktor sistem yang digunakan yaitu belumnya disahkannya Ripparkab sebagai Perda, (3) Faktor Pendanaan yang masih minim dalam mendukung perencanaan pembangunan pariwisata dalam rangka peningkatan daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 1997, *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Angkasa: Bandung
- _____. 2001, *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Angkasa: Bandung
- Faludi, Andreas, 1973. *Planning Theory*. Pergamon Press: United Kingdom.
- Iqbal, Muhammad. 2007. "analisis peran pemangku kepentingan dan implementasinya dalam pembangunan". *Jurnal penelitian dan pengembangan Pertanian*. Vol. 26. No. 3. Hal. 95-102.
- Pitana, I Gde. dan Surya Diarta, I Ketut. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Pitana, I Gede dan Putu Gayatri. 2005. *Sosiologi Prowisata: Kajian Sosiologis Terhadap Struktur, Sistem dan Dampak-Dampak Parawisata*. Edisi pertama. Andi: Yogyakarta.
- Riyadi dan Deddy S. Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Parawisata: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media: Yogyakarta.
- Yoeti, Oka A. 1985. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Angkasa, Bandung